



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 276 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga lebih meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu membentuk Panitia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan bacaan berupa penghimpunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Mimika.
  - b. melaksanakan kegiatan penghimpunan dalam tahapan pengeditan, pencetakan dan pendistribusian dokumen.
  - c. bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui DPA-OPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPR Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

# SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 276 Tahun 2025  
Tanggal, 28 Agustus 2025

## SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYEDIA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Johannes Rettob, S.Sos.,MM	Bupati Mimika	Penasehat
2	Abraham Kateyau, SE	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Drs. Ananias Faot, M.Si	Asisten Bidang Pemerintahan dan KESRA	Penanggungjawab
4	Muh. Jambia Wadan Sao, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
5	Norawati Simanjuntak, SE.,M.Si	Kasubbag Dokumentasi Hukum	Sekretaris
6	Yulens Mirino, SH.,MH	Kasubbag Produk Hukum	Anggota
7	Isak Lokobal, SH.,MH	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
8	Yosephina Howay, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
9	Denius Murib, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
10	Christina R. Bonay, A.Md	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
11	Murni Hutapea, S.Sos.,M.Si	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
12	Anselmus H. Tapun, SE	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
13	Yosephina Beanal, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
14	Parlas Ompusunggu, SH	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
15	Hotliger Siburian, S.Kom	Honorer Bagian Hukum	Anggota
16	Oswaldus Segu, SH	Honorer Bagian Hukum	Anggota
17	Mawa' Yoli Katemba, S.AK	Honorer Bagian Hukum	Anggota
18	Anjaz S.U. Lamanepa, SKM	Honorer Bagian Hukum	Anggota
21	Dumanto Tendengan, S.AB	Honorer Bagian Hukum	Anggota
22	John Marthen Aipassa, SH	Honorer Bagian Hukum	Anggota
23	Denis Putra Batti, SH	Honorer Bagian Hukum	Anggota
24	Hilda Sannaria Sinambela, S.IP	Honorer Bagian Hukum	Anggota
25	Mita Rian Rana Baubessy, SE	Honorer Bagian Hukum	Anggota
26	Irama Siallagan, SP	Honorer Bagian Hukum	Anggota
27	Lamria Putri Julinda Simarmata, SH	Honorer Bagian Hukum	Anggota
28	Irnyatha Bala, ST.,M.Si	Staf pada BPKAD	Anggota
29	Alfian Delfiantriso	Staf pada Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011